

# Andi Iwan Darmawan Aras Prihatin dengan Minimnya Anggaran Penanggulangan Banjir Bengkulu

Updates. - **INFORMAN.ID**

Sep 2, 2022 - 20:15



*Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras*

BENGKULU - Wakil Ketua Komisi V [DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras](#) mengaku prihatin dengan pengalokasian dana penanggulangan banjir untuk wilayah Provinsi [Bengkulu](#). Ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) dapat lebih memaksimalkan lagi dalam pengalokasian dana di daerah-daerah rawan bencana seperti di Bengkulu.

"Kalau melihat dari kesiapan anggaran yang dialokasikan Kementerian PUPR, sangat minim dan sangat tidak memungkinkan. Jangankan untuk menghilangkan banjir, mereduksi banjir pun dengan anggaran yang ada saya kira sangat terbatas dan tidak bisa berbuat banyak," tutur Andi Iwan di [Bengkulu](#), Jumat (2/9/2022).

Ada banyak hal yang harus dikerjakan dalam penanggulangan musibah banjir ini seperti penggalian kali atau sungai, pembersihan. Menurut Politisi Partai [Gerindra](#) ini setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk menangani masalah tersebut. Sedangkan alokasi yg ada saat ini untuk penanggulangan banjir di [Bengkulu](#) hanya sekitar Rp100 triliun.

"Kami merasa perlu mendorong agar Kementerian PUPR bisa memaksimalkan alokasi dana untuk di Bengkulu ini agar penaggualan banjir lebih maksimal," tegas Andi Iwan.

Dirinya berharap, dalam pembahasan anggaran yang sedang dilakukan di Komisi V [DPR RI](#) bersama para mitra kerja, dapat mengakomodir anggaran pembangunan infrastruktur provinsi [Bengkulu](#) untuk tahun 2023. "Dari sisi perencanaan dan desain, saya kira mereka semua sudah siap. Tinggal bagaimana pengalokasian anggarannya agar bisa dioptimalkan saja. Karena untuk tahun ini sudah agak sulit untuk dilakukan pergeseran anggaran," terangnya.

Diketahui, curah hujan yang sangat tinggi telah mengakibatkan musibah banjir di Provinsi [Bengkulu](#). Tercatat, dari 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi [Bengkulu](#) , 8 diantaranya mengalami musibah banjir. "Kalau kita mengandalkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal ini, saya kira sangat jauh. Memang beberapa kewenangannya ada di pemerintah pusat," pungkasnya. (es/aha)